

DSAS Terkini merupakan ringkasan Tim Teknis atas hasil pembahasan dalam rapat-rapat DSAS IAI dalam kurun waktu tertentu. DSAS Terkini memberikan informasi umum mengenai keputusan sementara dari DSAS IAI. Keputusan final DSAS IAI dilakukan melalui serangkaian tahapan penyusunan standar akuntansi keuangan (due process procedure) yang ditetapkan dalam Peraturan Organisasi IAI. Keputusan final DSAS IAI tersebut dipublikasikan dalam bentuk PSAK, ISAK, dan Buletin Implementasi.

Daftar Topik

- 1 Penyusunan SAK Syariah
- 2 Stakeholders Management

1. PENYUSUNAN SAK SYARIAH

a Dengar Pendapat Publik DE PSAK 401 & ISAK 403

Sebagai bagian dari *due process procedures* penyusunan PSAK 401 & ISAK 403, DSAS IAI menyelenggarakan acara Dengar Pendapat Publik DE PSAK 401 & ISAK 403 secara daring pada Rabu, 20 Agustus 2025. Narasumber pada acara tersebut antara lain Achmad Zaky, Eko Wisnu Warsitosunu, dan Herry Setiadie. Acara dengar pendapat publik bertujuan untuk menyampaikan pokok pengaturan yang tertuang dalam draf eksposur dan meminta tanggapan publik secara langsung.



b Pengesahan PSAK 401 & ISAK 403

Pada 21 Oktober 2025 DSAS IAI telah mengesahkan PSAK 401: *Penyajian dan Pengungkapan dalam Laporan Keuangan Syariah* dan ISAK 403: *Komponen Laporan Keuangan Entitas Syariah yang Menerapkan SAK Indonesia Untuk Entitas Privat dan SAK Indonesia Untuk Entitas Mikro, Kecil, dan Menengah*. Terdapat perubahan besar pada laporan penghasilan komprehensif agar struktur laporan penghasilan komprehensif lebih konsisten dan meningkatkan komparabilitas. PSAK 401 juga mensyaratkan pengaturan pengungkapan tambahan yaitu ukuran kinerja tetapan manajemen

(*management-defined performance measures*) dengan tujuan mengomunikasikan pandangan manajemen atas aspek kinerja keuangan secara keseluruhan. Sementara itu, ISAK 403 mensyaratkan entitas syariah yang menerapkan SAK EP atau SAK EMKM untuk menyajikan laporan perubahan dana sosial sebagai bagian dari komponen laporan keuangan lengkapnya. Penyajian laporan perubahan dana sosial tersebut disusun sesuai dengan pengaturan di PSAK 401.

PSAK 401 dan ISAK 403 berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai atau setelah 1 Januari 2027 dan dapat diakses melalui SAK Online.



c Sosialisasi PSAK 401 & ISAK 403

Pada 21 Oktober 2025 DSAS IAI mengesahkan PSAK 401 dan ISAK 403. Sebagai bagian dari *due process procedure* penerbitan standar, DSAS IAI mengundang para pemangku kepentingan untuk turut hadir pada acara “Sosialisasi PSAK 401 & ISAK 403” yang akan dilaksanakan secara daring via platform Zoom pada Senin, 22 Desember 2025. Acara sosialisasi tersebut dibawakan oleh Achmad Zaky, selaku narasumber, dan Rio Eldianson, selaku moderator. Melalui kegiatan sosialisasi ini, praktisi ekonomi syariah, akuntan, auditor, serta pihak terkait lain diharapkan dapat memahami PSAK 401 dan ISAK 403, sehingga penyajian dan pengungkapan dalam laporan keuangan entitas syariah sesuai dengan SAK terkini dan dapat dibandingkan dengan laporan keuangan entitas yang merujuk pada PSAK 118, termasuk entitas syariah tercatat di pasar modal (*listed entity*).



d Pengesahan DE PSAK 408

Pada 22 Desember 2025, DSAS IAI telah mengesahkan DE PSAK 408: *Akuntansi Asuransi Syariah*. PSAK 408 mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dari akad yang digunakan dalam asuransi syariah. Penerbitan DE PSAK 408 bertujuan untuk meminta tanggapan publik atas usulan pengaturan di dalamnya. Finalisasi PSAK 408 ditargetkan akan dilakukan pada semester pertama tahun 2026.

e Dengar Pendapat Terbatas Revisi PSAK 408

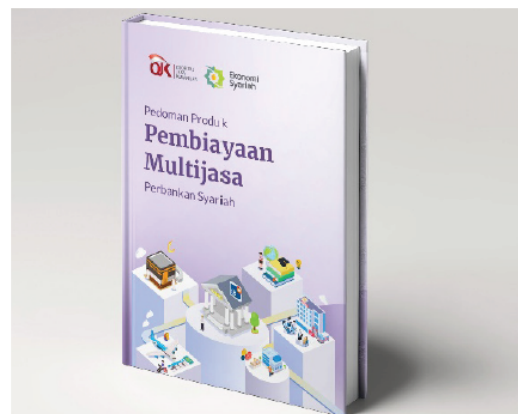
Sebagai komitmen dalam mengembangkan standar akuntansi syariah yang inklusif dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang relevan, DSAS IAI mengundang industri yang terdiri dari perusahaan asuransi syariah dan reasuransi syariah untuk hadir dalam agenda dengar pendapat terbatas PSAK 408: *Akuntansi Asuransi Syariah* pada Kamis, 21 Agustus 2025 secara tatap muka di Grha Akuntan. Acara tersebut bertujuan untuk meminta masukan dari industri atas isu akuntansi dalam transaksi asuransi syariah yang penting untuk dipertimbangkan dalam penyusunan PSAK 408.



2. STAKEHOLDERS MANAGEMENT

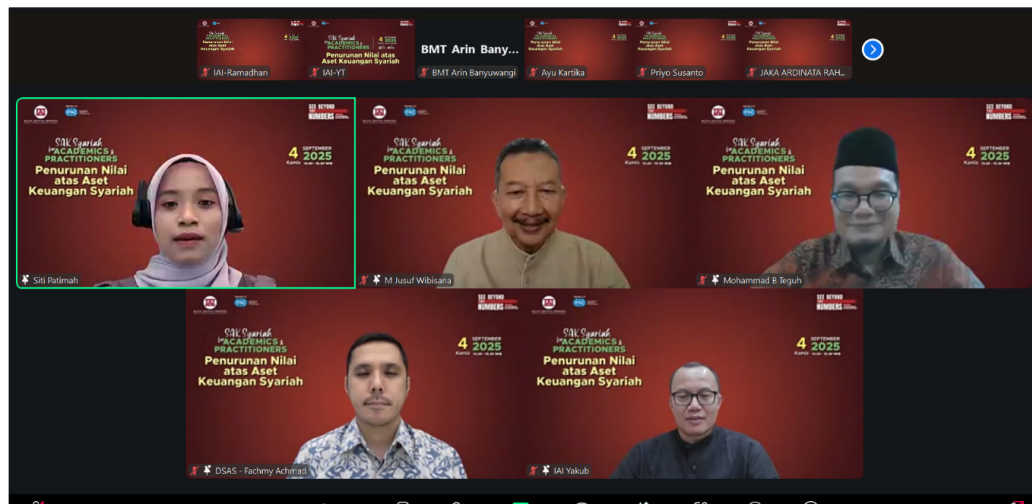
a FGD Otoritas Jasa Keuangan “Ijarah Jasa”

Pada 2 Oktober 2025, DSAS IAI menghadiri FGD Departemen Perbankan Syariah OJK bertempat di Novotel Suites, Malioboro, Yogyakarta yang diwakili oleh Achmad Zaky dan Yakub. Tujuan diselenggarakannya FGD tersebut adalah penyampaian tanggapan DSAS IAI atas skema dan perlakuan akuntansi ijarah atas jasa tidak langsung.



b SAK Syariah for Academics & Practitioners Seri Ke-10 “Penurunan Nilai atas Aset Keuangan Syariah”

DSAS IAI kembali menyelenggarakan acara SAK Syariah for Academics & Practitioners. SAK Syariah for Academics & Practitioners merupakan kegiatan sosialisasi yang dirancang untuk meningkatkan pemahaman akademisi dan praktisi atas konsep dan penerapan SAK Syariah dalam praktik. Acara ini berlangsung secara serial sejak tahun 2023. Pada 4 September 2025, seri kesepuluh membahas mengenai “Penurunan Nilai pada Aset Keuangan Syariah” dengan narasumber M. Bagus Teguh Perwira (DSAS IAI), Fachmy Achmad (DSAS IAI), serta moderator Aisha Nahomy (KASy IAI). Acara ini diikuti sedikitnya 480 orang secara daring. Rekaman atas acara tersebut dapat diakses pada tautan: <https://bit.ly/SSAP-PSAK413-0925>.



c FGD Bank Indonesia terkait Pendalaman Aspek Syariah atas Pasar Uang & Valuta Asing Syariah

Fachmy Achmad, Anggota DSAS IAI menjadi narasumber dalam FGD Pendalaman Aspek Syariah atas Pasar Uang & Valuta Asing (PUVA) Syariah yang diselenggarakan oleh Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia pada 18 September 2025 di Pullman Hotel, Jakarta. Fachmy Achmad menyampaikan aspek pengaturan standar yang diterapkan pada transaksi repo syariah, yaitu PSAK 411: *Akuntansi Wa'd*, salah satunya terkait ilustrasi jurnal transaksi repo syariah.



d Workshop Pra-Ijtima' Sanawi Dewan Pengawas Syariah X Tahun 2025

Pra Ijtima Sanawi adalah acara workshop tahunan yang diselenggarakan oleh Dewan Syariah Nasional MUI untuk Dewan Pengawas Syariah (DPS), berfokus pada meningkatkan *soft skill* dan *hard skill*, sosialisasi fatwa terbaru, serta pembahasan teknis dan substantif terkait keuangan syariah agar DPS bisa lebih efektif mengawasi lembaga keuangan syariah di Indonesia. Pada Workshop Pra-Ijtima' Sanawi tahun ini, Yakub (Direktur IAI) memaparkan pokok pengaturan standar yang diterapkan pada penyajian laporan keuangan entitas syariah, seperti bank syariah, entitas asuransi syariah, lembaga keuangan mikro syariah, serta dana pensiun syariah.



e Workshop PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) “Skema Pembiayaan Syariah Badan Layanan Umum”

Dalam mendukung peningkatan partisipasi IAI dan kerja sama dalam pengembangan kualitas standar akuntansi di Indonesia, DSAS IAI memenuhi undangan dari PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero) dalam kegiatan Workshop Skema Pembiayaan Syariah Badan Layanan Umum pada 7 Oktober 2025 di Bandung, Jawa Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Suhendar, Anggota DSAS IAI sebagai narasumber. Suhendar menyampaikan peran DSAS IAI sebagai standard-setter dan bagaimana PSAK dan ISAK Syariah disusun dan diterapkan oleh entitas yang menjalankan transaksi berbasis syariah.



f Rapat Pembahasan RPOJK tentang Produk Investasi pada Perbankan Syariah

Yasir, Ketua DSAS IAI menghadiri undangan rapat pembahasan Rancangan Peraturan OJK tentang Produk Investasi pada Perbankan Syariah yang diselenggarakan oleh Departemen Perbankan Syariah OJK pada Rabu, 8 Oktober 2025 di Hotel Tentrem, Tangerang Selatan. Pada agenda tersebut DSAS IAI menyampaikan pandangannya terkait pokok-pokok pengaturan produk investasi perbankan syariah yang diusulkan oleh OJK dalam RPOJK. Nantinya, POJK tersebut akan mengatur tata cara pengajuan, perizinan, perubahan, penghentian produk, termasuk manajemen risiko produk.



DEWAN STANDAR AKUNTANSI SYARIAH IKATAN AKUNTAN INDONESIA

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

DSAS IAI bertugas dan bertanggung jawab atas:

- Melakukan perumusan, pengembangan dan pengesahan SAK Syariah, Buletin Teknis Syariah, dan produk lain terkait SAK Syariah.
- Menjawab pertanyaan dari pemerintah, otoritas, asosiasi, dan lembaga luar negeri yang terkait dengan SAK Syariah.

DUE PROCESS PROCEDURES

DSAS IAI dalam melakukan penyusunan SAK Syariah mengikuti *due process procedures* yang ditetapkan oleh Peraturan Organisasi IAI. Proses penting tersebut meliputi identifikasi isu untuk dikembangkan menjadi standar, melakukan riset, melakukan penulisan awal draf eksposur, pembahasan draf eksposur, pengesahan draf eksposur, publikasi draf eksposur, melakukan *public hearing*, dan pengesahan standar. SAK Syariah yang dipublikasikan seluruhnya disertai *covering letter* dari DSN-MUI.

SUSUNAN



Yasir (Ketua)
EY Indonesia



M. Bagus Teguh Perwira (Anggota)
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



Gunawan Setyo Utomo (Anggota)
Ex-officio Otoritas Jasa Keuangan



Putri Alminda Kamila (Anggota)
Ex-Officio Bank Indonesia



Suhendar (Anggota)
Praktisi



M. Dawud Arif Khan (Anggota)
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



Abdul Rahmat (Anggota)
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



Prof. Jaih Mubarak (Anggota)
Ex-officio Dewan Syariah Nasional MUI



Alis Subiyantoro (Anggota)
Ex-Officio Otoritas Jasa Keuangan



Fachmy Achmad (Anggota)
Bank BTPN Syariah



Juni Supriyanto (Anggota)
Badan Pengelola Keuangan Haji



Achmad Zaky (Anggota)
Universitas Brawijaya



Herry Setiadie (Anggota)
PwC Indonesia



M. Gunawan Yasni (Anggota)
Praktisi



Eko Wisnu Warsitosunu (Anggota)
Universitas Indonesia



**Graha Akuntan Jl. Sindanglaya No.1
Menteng, Jakarta**
Telp: (021) 31904232, 3900004, 3140664
Ext. 222/333/777